



**KELEMBAGAAN DAN POTENSI LOKAL DALAM MENDUKUNG
UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Institutions and Local Potential in Supporting MSMEs in the Special Region of
Yogyakarta*

Suyatno

Universtas Aisyiyah Yogyakarta

Email: suyatnosuyatno62@yahoo.com

Abstract

To utilize, empower and develop the existing potential and resources, strong and effective institutions are needed. This study wants to see local resource-based MSME institutions aimed at supporting the economy. This study examines local potential and institutions in local resource-based SMEs as an element of institutional development. This research is intended to explore, uncover, study, analyze and understand the potential of local and institutional resources in Yogyakarta Province. The purpose of this study was to find a picture of institutional based on potential, and local potential based resources in the Province of Yogyakarta. This study uses a qualitative descriptive method to provide a description and get a clear picture that is useful for answering the formulation of the problem. Data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (UKM), the Department of Cooperatives and SMEs in Yogyakarta and various literatures such as books, articles, as well as the homepage, the SIBAKUL Yogja application and the Media. In this study, it was obtained that the MSME Institutionalization in DI Yogyakarta was formed from a community that empowers, develops knowledge. Culture and technology and local resources, utilizing local resources involving the community sector, government, academics and business.

Keywords: *Institutional, Local Potential, and MSME*

Abstrak

Untuk memanfaatkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi dan sumberdaya yang ada perlu adanya kelembagaan yang kuat dan efektif. Penelitian ini ingin melihat kelembagaan UMKM berbasis sumberdaya lokal yang ditujukan untuk menopang perekonomian. Penelitian ini mengkaji Potensi lokal dan kelembagaan dalam UMKM berbasis sumberdaya local sebagai unsur dari pengembangan kelembagaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali, mengungkap, mengkaji, menganalisa dan memahami potensi sumberdaya lokal dan kelembagaan di Provinsi Yogyakarta. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran Kelembagaan berdasarkan potensi, dan sumberdaya berbasis potensi Lokal di Provinsi D I Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif untuk memberikan deskripsi serta mendapatkan gambaran yang jelas yang berguna untuk menjawab rumusan masalah. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Dinas Koperasi dan UKM DI Yogyakarta dan berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, serta homepage, aplikasi SIBAKUL Yogja dan Media. Dalam Penelitian ini diperoleh gambaran bahwa Kelembagaan UMKM di DI Yogyakarta terbentuk dari masyarakat yang memberdayakan, mengembangkan pengetahuan. Budaya dan teknologi dan sumberdaya lokal, memanfaatkan sumberdaya - sumberdaya lokal yang melibatkan sektor



masyarakat, Pemerintah, Akademisi dan Bisnis.

Kata Kunci: Kelembagaan , Potensi Lokal, dan UMKM

PENDAHULUAN

D.I. Yogyakarta mempunyai berbagai macam potensi berupa sumberdaya alam, budaya, adat istiadat, kompetensi SDM untuk menciptakan berbagai macam kegiatan dan kreativitas dalam pemenuhan kebutuhannya masyarakat. Berdasarkan data *center* Kementerian Koperasi dan UKM sejak pandemic Covid-19 terjadi penurunan penjualan produk UMKM sebesar 57% (www.merdeka.com). Meskipun demikian, UMKM masih menjadi alternative penggerak perekonomian kerakyatan. Hal ini disebabkan UMKM yang fleksibel dan mudah berinovasi baik dalam usaha maupun menerapkan teknologi tepat guna, dan birokrasi sederhana. UMKM mampu bertahan juga karena UMKM menghasilkan produk/jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal. (Nurlinda Nurlinda and Junus Sinuraya: 2020) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, Pelaku koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19 mendapat kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. UMKM dapat lebih optimal, komprehensif, dan terkoordinasi dengan baik. Untuk itu diperlukan kelembagaan yang mampu memfasilitasi.

Dalam perkembangannya UMKM memiliki kelemahan dan permasalahan dalam menjalankan usahanya. Menurut Haeruman yang menjadi tantangan bagi dunia usaha, terutama pengembangan UKM mencakup aspek, antara lain: 1. Peningkatan kualitas SDM dalam hal kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi, termasuk di dalamnya skala usaha kecil. 2. Kompetensi kewirausahaan, 3. Akses yang lebih luas terhadap permodalan, 4. Informasi pasar yang transparan, (Rahmawati, 2019).

Permasalahan UMKM di DI Yogyakarta adalah pemanfaatan potensi yang ada untuk bersaing dan bertahan sebagai akibat pandemik sehingga perlu meningkatkan pendayagunaan UMKM dengan penguatan kelembagaan. Untuk memberdayakan dan mendayagunakan potensi lokal terutama terkait dengan UMKM maka perlu adanya kelembagaan yang kuat. Kelembagaan mempunyai peran dan fungsi dalam pemberdayaan, pendayagunaan dan fasilitasi kegiatan UMKM.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan individu/ masyarakat sehingga memperkuat kapasitas, untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Sumardjo,2019). Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran/ pendidikan dan usaha-usaha lain termasuk penyediaan fasilitas tertentu, yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah dan ancaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. (Rusdi Hidayat, Sonja Andarini:2020).

Untuk meningkatkan UMKM di D.I. Yogyakarta diperlukan adanya lembaga yang kuat sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan, pendayagunaan dan pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dapat terwujud dan berhasil.

Dari gambaran diatas peneliti melakukan mengkaji: Bagaimana Potensi lokal dan Kelembagaan UMKM di Yogyakarta mampu berkembang mendukung perekonomian? Penelitian ini dimaksudkan dan bertujuan untuk menggali,



mengungkap, mengkaji, menganalisa dan mengembangkan kelembagaan UMKM yang berbasis potensi lokal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang fenomena yang berguna untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai Kelembagaan dan Potensi Lokal mendukung UMKM Dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat di DI Yogyakarta ("Neuman, W. Lawrence, 1997). Objek penelitian ini adalah UMKM di Provinsi DIY.

Penelitian ini menggunakan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Dinas Koperasi dan UKM DIY, Media Sosial, berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, serta homepage untuk mengakses data dan informasi terkini berkaitan dengan potensi UMKM di Provinsi Yogyakarta, dan aplikasi SIBAKUL Yogja dan Media.

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses telaah data dimulai dengan identifikasi potensi UMKM, Lembaga yang terlibat dalam UMKM, dan permasalahannya, di DI Yogyakarta kemudian dilanjutkan dengan penelusuran data dan menyajikannya secara naratif sehingga dapat ditarik kesimpulan (Miles, Matthew B and Huberman A Michael:2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi UMKM

Dari hasil penelitian ini diperoleh data bahwa DI Yogyakarta mempunyai potensi UMKM yang cukup besar yang tersebar di berbagai Kabupaten Kota dengan berbagai sector dan karakteristik. Data BPS menyebutkan bahwa jumlah UMK di D.I. Yogyakarta mencapai 238.619 unit. Jumlah tersebut mampu memberikan kontribusi pada PDRB DI Yogyakarta sebesar 6,41%. Adapun jumlah unit dari UMK tersebut tersebar di 5 kabupaten/kota yang ada di Yogyakarta, yakni di Kabupaten Bantul sebesar 26%, Kabupaten Gunung kidul sebesar 22%, Kabupaten Kulonprogo sebesar 20%, Kabupaten Sleman sebesar 18%, dan Kota Yogyakarta sebesar 14% (Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY: 2019).

Jumlah UMKM berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM DI Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah terbanyak UMKM di DI Yogyakarta berada di Kabupaten Sleman sejumlah 84,215 unit diikuti Kabupaten Bantul sejumlah 66,585 unit, dan ketiga Kabupaten Gunung Kidul sejumlah 53,493 unit. Kabupaten Kulon Progo berjumlah 34,936 unit dan terakhir Kota Yogyakarta berjumlah 31,496. Unit unit UMKM ini merupakan lembaga UMKM yang memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya lokal.

Dilihat dari sektor usaha yang terbanyak adalah sektor usaha pengolahan menduduki jumlah tertinggi yaitu sebanyak 209,912 unit yang terbanyak di Kabupaten Sleman sejumlah 57,949; Kedua sektor jasa perorangan yang melayani Rumah Tangga sebanyak 11,040 unit yang terbanyak berada di Kabupaten Sleman sejumlah 5,147 unit; dan Ketiga adalah sektor ekonomi kreatif sejumlah 9,617 unut yang terbanyak di Kabupaten Bantul sejumlah 3,665.

Produk pengolahan berasal dari bahan baku yang diolah menjadi produk

olahan. D.I. Yogyakarta mempunyai banyak ragam produk olahan diantaranya adalah produk pangan olahan, dan juga industry olahan seperti industri olahan pangan yang dijalankan adalah tempe, tahu, bakpia, jamur, dan emping;, Produk olahan salak, olahan pisang, olahan jambu air menjadi olahan ladu dan sirup, usaha pengolahan perikanan, pengolahan kulit, usaha olahan berbahan baku susu, pengolahan batu alam menjadi batu hias, dekorasi, patung dan barang seni lain dan sebagainya.

Untuk menghasilkan produk olahan diperlukan pengetahuan dan inovasi yang mampu mengolah bahan baku yang terdapat di daerah itu menjadi produk olahan yang lebih bernilai tambah dan berdayaguna. Pengetahuan dan inovasi yang dimiliki masyarakat lokal mampu merubah bahan baku yang ada menjadi produk baru yang lebih bernilai, menarik dan berdaya guna yang bisa dimanfaatkan.

Sektor jasa perorangan yang berkembang di D.I. Yogyakarta antara pengguna dan pelaku usaha jasa melakukan interaksi. Pengguna menawarkan kebutuhan, dan pelaku usaha mencoba memenuhinya. Dengan demikian, pelaku usaha jasa dituntut memiliki keterampilan tidak hanya yang terkait dengan kemampuan hard skill tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan baik (soft skill). Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan pemahaman terhadap kultur dari masing masing pelanggan. Untuk memberikan layanan yang optimal sektor ini memerlukan kreativitas, inovasi , keramahan dan kemampuan berkomunikasi. Usaha sektor jasa diantaranya adalah jasa seni, jasa transportasi, jasa rumah tangga, jasa konstruksi, jasa pendidikan. Untuk itu diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kompetensi terkait dengan bidang layanan dan pembekalan soft skill.

Berdasarkan Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta (2019) menunjukkan adanya suatu potensi yang sangat besar di bidang ekonomi kreatif diantaranya adalah sektor kuliner, fashion dan kerajinan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa 40 persen industri kreatif di Yogyakarta terletak pada sektor pangan dan minuman, disusul kerajinan sebesar 19 persen, dan sektor-sektor industri kreatif lainnya. Dalam pengembangan sektor ini diperlukan SDM yang inovatif dan kreativitas yang cukup sehingga mampu menciptakan barang barang kreatif yang mempunyai nilai jual dan nilai guna.

Menurut Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (KGPAA) Paku Alam terdapat 5 lima sektor industry kreatif terbesar yang bergerak di usaha kuliner, kriya, fashion, penerbitan, dan fotografi. Subsektor kuliner ada sekitar 106 ribu unit usaha, lalu bidang kriya ada 36 ribu usaha, fashion 23 ribu usaha, penerbitan 3 ribu usaha, dan fotografi sekitar seribu usaha ditambah banyaknya industry kreatif digital.(Tempo 2019).

Sektor kerajinan di D.I. Yogyakarta didukung adanya wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang mampu menggerakkan sektor industry. Kerajinan Kreatif terus berkembang didukung dengan tersedianya SDM yang kreatif dan bahan baku lokal didukung dengan sentuhan jiwa seni dan kekhasan budaya Yogyakarta. UMKM mempunyai potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian rakyat. UMKM di D.I. Yogyakarta tersebar di 5 Kabupaten Kota yang sangat beragam dan memiliki kaitan dengan ketersediaan sumberdaya dan budaya ,pengetahuan, keterampilan tangan dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. UMKM di D.I. Yogyakarta didukung dengan potensi yang sangat besar berupa sumber daya yang berupa bahan baku, SDM kreatif , Pengetahuan Lokal, Budaya Lokal, dan dukungan Fasilitasi dan kebijakan Pemerintah dan banyaknya perguruan tinggi

dengan kegiatan Tri Dharmanya terutama dalam pengaplikasian hasil penelitian dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kelembagaan UMKM Berbasis Lokal

Potensi potensi UMKM yang ada di Yogyakarta ini tidak akan bertahan lama dan kuat tanpa adanya kelembagaan yang kuat. Untuk lebih memperkuat dan mengembangkan UMKM maka diperlukan pembinaan dan penguatan kelembagaan. Menurut Mardikanto (2010), pembinaan Kelembagaan meliputi ketersediaan modal dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, pengembangan jejaring usaha, serta perizinan usaha pelaku UMKM. (Johan Bhimo Sukoco, 2019).

D.I. Yogyakarta mempunyai banyak UMKM yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota yang telah di pusatkan di Sentra- sentra yang memerlukan lembaga yang kuat dan lembaga penunjang. Lembaga Penunjang berupa lembaga penyedia modal baik lembaga perbankan maupun non bank, lembaga pembinaan, pelatihan dan pengembangan SDM, Lembaga promosi dan pemasaran, dan lembaga pemerintahan yang menangani pembinaan, pengembangan dan perlindungan UMKM. Keseluruhan lembaga ini harus saling terkoordinasi dan terikat satu sama lain sehingga program pengembangan dan pemberdayaan UMKM dalam mendorong perekonomian Masyarakat bisa terwujud.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan UMKM saling berkaitan satu sama lain dengan memerankan peran masing masing yang terikat aturan aturan, norma sejalan dengan kepentingan masing masing lembaga atau organisasi (Syahyuti : 2004). D.I. Yogyakarta memiliki banyak Lembaga UMKM, namun demikian perlu dilakukan penguatan agar Lembaga UMKM bisa lebih efektif dan efisien. Lembaga UMKM di DI Yogyakarta berdiri dengan bermodalkan sumberdaya lokal dan budaya lokal yang mampu mendorong bidang pariwisata.

Masyarakat sebagai pelaku utama UMKM mempunyai peran utama sebagai pencipta dan pelaku usaha dibidang umkm. Masyarakat lokal sebagai pelaku utama aktivitas UMKM di Yogyakarta terbagi menjadi beberapa bidang. Pelaku utama UMKM yang terlibat baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja dalam proses produksi. DI Yogyakarta mempunyai **291,191** UMKM yang bergerak diberbagai bidang usaha. Dalam memperkuat dan mengembangkan usahanya UMKM telah membentuk group atau kelompok dalam bentuk Koperasi sesuai dengan bidang usahanya/Assosiasi yang bergabung dalam UMKM, Lembaga keuangan dan perbankan mulai dari Bank BUMD, BUMN dan Bank Swasta, Akademisi baik perguruan tinggi maupun Lembaga pelatihan baik Lembaga pemerintah maupun Lembaga swasta. Dalam Kegiatan UMKM di D I Yogyakarta melibatkan banyak stakeholders yang saling berinteraksi yaitu *contumers, employees, suppliers, communities and shareholders*. (Darden,2019).

Kelembagaan UMKM di DI Yogyakarta telah tumbuh berkembang sebagai Lembaga utama pelaku bisnis dan lembaga penunjang yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan UKMK. Lembaga yang terlibat mulai dari Masyarakat, Akademisi, Pemerintah dan Bisnis dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, budaya lokal dan pengetahuan lokal yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian. Pemerintah telah mengembangkan strategi dan kebijakan mulai

dari pemodal, pemberian pelatihan dan kebijakan pengembangan kelembagaan.

Lembaga penunjang yang ambil bagian dalam memperkuat kegiatan UMKM diantaranya adalah Lembaga Keuangan, Lembaga Pendidikan dan pelatihan, Lembaga pengembangan, Lembaga pemasaran dan Lembaga lain yang bekerja sesuai dengan kepentingan dan kompetensi serta fungsi masing-masing. Kelembagaan UMKM terikat oleh aturan-aturan yang ada dalam lembaga. Lembaga UMKM mempunyai struktur mulai yang paling sederhana sampai dengan yang lebih kompleks berdasarkan besar kecilnya UMKM. Paling tidak dalam Kelembagaan UMKM terdapat Manajer dan juga yang menangani keuangan dalam suatu Unit usaha. (Syahyuti : 2004).

Kelembagaan UMKM di DI Yogyakarta diklasifikasi menjadi lembaga utama kegiatan UMKM, dan Lembaga penunjang yang terdiri atas Lembaga Pembiayaan baik lembaga perbankan maupun non bank, lembaga bisnis yang melakukan pemasaran, lembaga pembinaan, pelatihan dan pengembangan serta lembaga pemerintah yang berperan sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan. Keseluruhan Lembaga ini saling berinteraksi dan saling terikat menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan kompetensinya.

Lembaga utama yang bergerak dibidang UMKM, lembaga ini terdiri atas masyarakat yang berperan dan berfungsi sebagai pelaku utama dalam menciptakan, mengembangkan dan memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan selanjutnya dikembangkan dan di berdayagunakan untuk dibisniskan melalui UMKM. Lembaga ini perlu mendapat fasilitasi berupa pelatihan, pendidikan, permodalan dan pengetahuan untuk berinovasi dan pengetahuan manajemen. Untuk meningkatkan dan memperkuat kompetensi dan kapasitas lembaga diperlukan lembaga penunjang. Lembaga utama UMKM ini memanfaatkan sumberdaya budaya dan teknologi lokal (Nurlinda & Junus Sinuraya :2020). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, DI Yogyakarta mempunyai 291.191 lembaga UMKM yang tersebar di 5 Kabupaten Kota di DI Yogyakarta.

Lembaga Pemerintah yang berperan dan berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan fasilitasi pengembangan UMKM. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuat kebijakan dalam mengembangkan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UKM. Dimasa Pandemi banyak UMKM yang harus berhenti usaha atau beralih usaha, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah telah menyusun arah kebijakan yaitu meningkatkan sinergitas dengan stakeholder melalui Forum Pentahelix; Pembinaan secara terstruktur terhadap koperasi dan UMKM berdasarkan basis data di SIBAKULJOGJA; melaksanakan kemitraan antara UMKM dengan Swasta dan BUMN; Melaksanakan pembinaan dan sertifikasi produk UKM agar daya saing meningkat; Pengembangan Enterprenurship pelaku wirausaha baru di wilayah miskin dan wilayah dengan ketimpangan pendapatan.; Peningkatan kualitas dan inovasi produk wirausaha baru; dan melaksanakan Kemitraan antara Wirausaha Baru dengan Swasta dan BUMN dalam pemenuhan bahan baku dan pemasaran. (LAKIP Dinas Koperasi dan UKM D I Yogyakarta 2020).

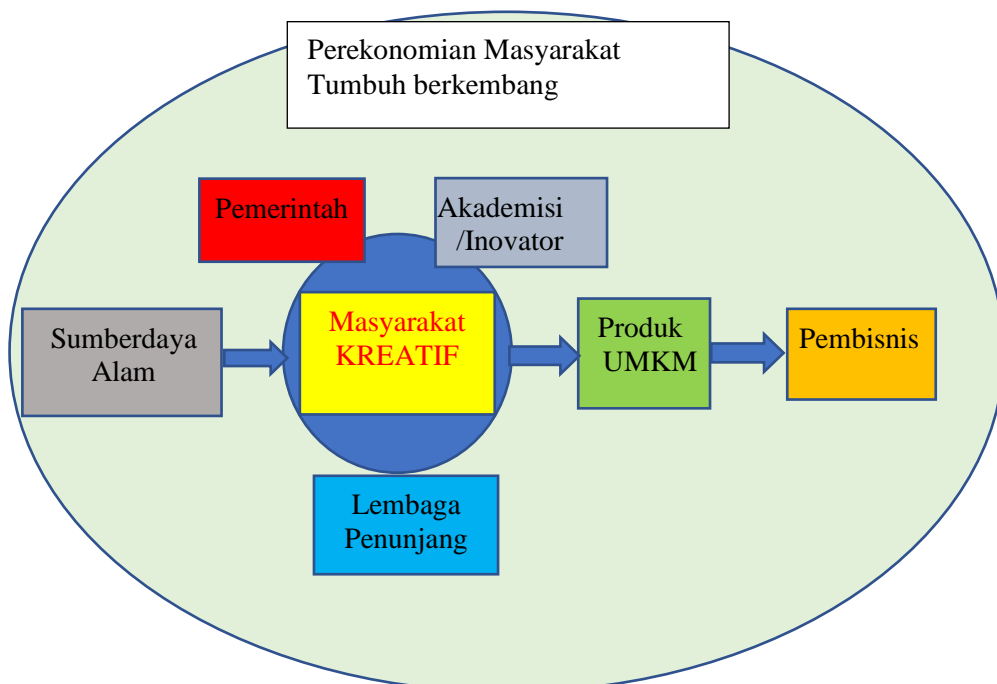
Lembaga Keuangan mempunyai peran dan fungsi memberi akses pembiayaan baik dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Selama Pandemi Covid-19, pemerintah pusat

melalui LPDB memberikan kemudahan skema permodalan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga banyak Koperasi terbantu dalam mendapatkan modal usaha, diantaranya melalui subsidi bunga bagi Koperasi dan UMKM dan Pinjaman Bunga Ringan. Lembaga keuangan Bank maupun non Bank telah banyak berperan dan mambatu UMKM mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Lembaga Keuangan melalui kebijakan Pemerintah Daerah dengan pola Kerjasama mampu membantu UMKM dalam permodalan.

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan mempunyai peran dan fungsi memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM baik oleh lembaga Pemerintah, lembaga Perguruan Tinggi maupun lembaga pelatihan non pemerintah atau non perguruan tinggi. Lembaga ini telah mengenalkan dan memberikan tehnologi dan inovasi baru sesuai dengan kompetensinya. Banyak lembaga Pendidikan dan Perguruan tinggi di Yogyakarta mendorong lembaga lembaga UMKM utama untuk lebih kreatif dan inovatif dan mampu meningkatkan kualitas produk.

Lembaga Pemasaran dan Bisnis berperan dan berfungsi mengembangkan system bisnis dan pemasaran produk UMKM. Lembaga ini bisa dalam bentuk koperasi maupun perusahaan menengah dan besar yang menampung produk UMKM dan memberikan pelatihan untuk mengelola bisnis. Keseluruhan lembaga yang terlibat baik lembaga utama UMKM maupun lembaga penunjang harus Bersama sama saling mendukung. Lembaga UMKM saling berkaitan satu sama memerlukan suatu system yang terintegrasi. Lembaga pengembangan harus saling terintegrasi satu dengan yang lain dan saling berinteraksi satu sama lain diseleruh level (Suyatno:2019).

Pengembangan UMKM diawali dengan masyarakat memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya lain disekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Masyarakat kreartif menciptakan produk dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi tepat guna yang telah mereka miliki dan pelajari, Selanjutnya Pemerintah Daerah membantu dengan kebijakan dan fasilitasi dan didukung lembaga keuangan, lembaga pendidikan, inovasi dalam mengembangkan UMKM yang berbasis sumberdaya lokal, lembaga pengembangan sektor bisnis diwadahi dalam Koperasi bekerja sama dengan lembaga bisnis.



Dari uraian diatas dapat disarikan bahwa kelembagaan UMKM di DI Yogyakarta terbentuk dari pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya - sumberdaya lokal yang melibatkan sektor masyarakat, Pemerintah, Akademisi dan Bisnis. Kelembagaan UMKM di DI Yogyakarta berkembang tersebar di seluruh kabupaten Kota dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan pengeahuan serta budaya lokal secara kreatif dan inovatif , mulai dari industry olahan, industri kreatif, *handycraft*, *fashion*, kuliner yang di dukung dengan lembaga penunjang sesuai dengan kompetensinya.

KESIMPULAN

D.I. Yogyakarta mempunyai potensi lokal yang cukup banyak.yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota. Masing masing Kabupaten kota mempunyai pusat pusat pengembangan dan sentra pemasaran. Untuk mendorong perekonomian masyarakat UMKM memerlukan SDM yang kompeten dan berkualitas, yang didukung kelembagaan yang memberi pelatihan dalam peningkatan kompetensi SDM dan kemampuan manajemen terkait dengan bidang bisnis. Pemerintah D.I. Yogyakarta telah mempunyai program program dalam pelatihan dan pengembangan namun masih perlu keterlibatan sector professional. UMKM di D.I. Yogjakarata melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, Pembisnis yang melakukan jalannya perekonomian dan proses bisnis, Akademisi dalam pengembangan pengetahuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan kompetensinya, Pemerintah sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan dalam pengembangan UMKM, dan lembaga penunjang yang berperan mendukung pencapaian kemajuan UMKM sesuai dengan peran dan fungsinya perlu terus berinteraksi dan berkoordinasi untuk kepentingan peningkatan kualitas dan kapabilitas sesuai dengan peran, fungsi dan kompetensi masing-masing. Kelembagaan UMKM terbentuk dari pemaanfaatan dan pemberdayaan pengetahuan dan budaya lokal, sumberdaya - sumberdaya lokal yang melibatkan sektor masyarakat, Pemerintah, Akademisi dan Bisnis. Kelembagaan UMKM di DI Yogyakarta tersebar di seluruh kabupaten Kota dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan pengeahuan serta budaya lokal secara kreatif dan inovatif , mulai dari industry olahan, industry kreatif, handicraft, feisyen, kuliner yang di dukung dengan lembaga penunjang sesuai dengan kompetensinya. Kelembagaan UMKM di DI Yogyakarta telah tumbuh berkembang di berbagai Kabupaten Kota baik sebagai Lembaga utama pelaku bisnis dan Lembaga penunjang yang telah berdiri dengan melibatkan banyak stakeholder mulai dari masyarakat, akademisi, Pemerintah dan Bisnis. Pemerintah telah mempunyai strategi dan kebijakan untuk pengembangan UMKM, mulai dari pemodalan, pemberian pelatihan dan kebijakan untuk pengembangan klembagaan UMKM. sesuai dengan kepentingan dan kompetensi serta fungsi masing-masing. Dari hasil penelitian ini disarankan dalam Perlunya pemanfaatan dan pengembangan potensi potensilokal dengan memperkuat kelembagaan yang saling terikat satu sama lain sesuai dengan peran, fungsi dan kompetensinya melalui kopersasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan sektor Masyarakat, Pemerintah daerah, Akademisi, lembaga profesi dan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Daft, R. L. (2013). *Era Baru Manejemen New Era Of Management. Edisi 9*. Jakarta: Erlangga.



- Darden. (2019). Principle and purposes
<https://ideas.darden.virginia.edu/principles-and-purpose-a-statement-on-stakeholders>.
- DeCenzo, David A, Robbins, Stephen P. USA. (2010) *Fundamentals of Human Resource Management—10th ed* P 36.
- Dessler, Gary. (2017). Human resource management.—15 Edition. pages cm Revised edition, Pp 236-237.
- Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo. (2011) Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12 (1): 45-55.
- Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, and DeColle. (2010) Stakeholder Theory: The State of the Art, Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2010. We are grateful to our editor Ms. Paula Parish and to Cambridge University Press for permission to recast some of that material here. *Academy of Management Annals*. June 2010 DOI: 10.1080/19416520.2010.4955811.
- Freeman, R. Edward and McVea. (2001). *A Stakeholder Approach to Strategic Management*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.263511>.
- Johan Bhimo Sukoco. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Surakarta). *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, (1): 15-22.
- Miles, Matthew B and Huberman A Michael. (2009). *Analisa Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Neuman, W. Lawrence. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. USA: Allyn and Bacon, Incorporated.
- Nurlinda Nurlinda and Junus Sinuraya. (2020). UMKM Ditengah Badai Krisis (Menilik Potensi Dan Problematika) <https://www.researchgate.net>.
- Rahmawati. (2019). Pengaruh Keterampilan, Pengalaman, Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Ukm (Studi Kasus Di Panjangrejo, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta).
- Rusdi Hidayat N, Sonja Andarini. (2020). Strategi Pemberdayaan UMKM Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Bisnis Indonesia (JBI), 2020 Edisi Khusus Pengabdian Masyarakat*.
- Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti. (2020). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20umkm.pdf>.
- Suyatno. (2013). Desain Organisasi Dalam Program Pengembangan Mocaf di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, Asdep Budaya dan Etika, Dputi Bidang Kelembagaan Iptek. *Teknovasi Indonesia* 2 (2): 73-91.
- Suyatno. (2014). Kelembagaan Inovasi Akar Rumput Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Teknovasi Indonesia* 3 (1): 53-67.
- Suyatno. (2019). The Element of Systems in the Organisation of Local Food Development Program in Indonesia: Case Study in Trenggalek, East Java. *International Journal of Economic Behavior and Organization* 7 (2): 33-42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

